

**MEMBENTANG REPUBLIK, MEREKANG KONSENSUS:
ENTITAS INDONESIA DALAM SPANDUK PROTES PEREMPUAN
MASA REVOLUSI**

***OUTSPREADING THE REPUBLIC, STRENGTHENING THE CONSENSUS:
THE INDONESIAN ENTITIES IN THE WOMEN'S PROTEST BANNER IN
THE REVOLUTION PERIOD***

Galuh Ambar Sasi

Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah

ardhanawari@gmail.com

Naskah diterima 23-06-2020

Naskah direvisi 25-11-2020

Naskah disetujui 25-11-2020

ABSTRACT

The Indonesian revolutionary's historiography has relatively marginalized female actors, mainly in the creation of an Indonesian consensus. This paper seeks to fill this gap by offering alternative narratives through women's protest banners during the revolution in the Republic of Indonesia's capital. Furthermore, my findings underlined that there were four women's protests during that period. They were the neglect of Ratulangie's arrest then Pasundan State, the Mother's Day Parade in 1947, also the Women's Congress in 1949. Those were a manifestation of women's new citizenship, very complex and heterogeneous, but expresses loyalty, the new citizens' imagination, and their struggles. Meanwhile, the protesters were not solely feminist women, but ethnic minorities, marginalized groups, or women labeled as non-nationalist and the colonizers' collaborators. Another hand, their activity looks like a pageant of independent imagination.

Keywords: *visual history, indonesian revolution, women movement, decolonization, banner*

ABSTRAK

Historiografi revolusi Indonesia relatif meminggirkan aktor perempuan terutama dalam penciptaan konsensus keindonesiaan. Tulisan ini mencoba untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menghadirkan sebuah narasi baru melalui sumber alternatif berupa spanduk protes perempuan masa revolusi di ibu kota Republik Indonesia. Selanjutnya, proses analisis dilakukan mendeskripsikan elemen visual dan tekstual foto-foto protes perempuan yang merentang maupun mengangkat spanduk, merekonstruksi maknanya, mengidentifikasi orientasi atau ekspresi budaya tertentu, serta mencari keterkaitannya. Terakhir, makalah ini menghasilkan temuan bahwa protes perempuan sepanjang periode revolusi, ada empat: penolakan penangkapan Ratulangie, penolakan Negara Pasundan dan Pawai Hari Ibu pada 1947, serta Kongres Wanita 1949. Aksi tersebut adalah manifestasi kewarganegaraan baru perempuan, sangat kompleks dan heterogen, namun mengekspresikan hal yang sama, yaitu kesetiaan, imajinasi warga negara baru, dan pergulatan keindonesiaan mereka. Sementara itu, penggerak protes itu bukan semata-mata perempuan feminis, melainkan juga perempuan-perempuan dari etnis minoritas, kelompok marginal, atau perempuan-perempuan dengan label tidak nasionalis, dan kaki tangan penjajah. Di lain sisi, aktivitas itu terlihat seperti pertunjukkan imaji independen.

Kata kunci: sejarah visual, revolusi indonesia, gerakan perempuan, dekolonisasi, spanduk

PENDAHULUAN

Spanduk menjadi pemandangan lazim dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia dasawarsa kedua abad ke-21. Begitu lumrahnya

sampai-sampai dimanapun kita menjejalkan kaki, mulai dari jalan protokol, jalan kampung, toko, warung kelontong, hotel, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, tempat aman

seperti kompleks perumahan, wilayah konflik atau sengketa, bahkan universitas, mata kita senantiasa disugahi atribut berwarna-warni yang berisi figur tertentu maupun tulisan dengan beraneka ragam slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum (Pusat Bahasa 2019).

Fenomena itu semakin menjadi-jadi dan “biasa” terutama menjelang ulang tahun kota, organisasi politik, terlebih pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggolongkannya sebagai alat peraga kampanye dan membuat peraturan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 pasal 25 ayat 3-5 yang mengatur ukuran, jumlah, dan pemasangan (KPU RI 2018). Sekalipun telah ada aturannya, pemasangannya sering kali mengabaikan etika; dipasang sembarangan seperti pinggir jalan, pohon, tiang dan kabel listrik, jembatan penyeberangan, pagar taman, maupun fasilitas umum. Imbasnya, ruang publik berubah fungsi menjadi timbunan sampah visual (Hidayat dan Widana 2019).



Gambar 1. Protes menuntut hak pilih
Sumber: Brandywine River Museum of Art (2020)

Di lain sisi, spanduk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah aksi massa atau mobilisasi protes. Itu merepresentasikan dan menyelaraskan pesan dan opini para pemrotes (Wouters dan Walgrave 2017:362). Bekar (2015:339) dalam *Space, Language, and Power: The Rhetoric of Street Protest* menulis bahwa hal yang terpenting dalam membuat spanduk protes adalah mudah dipahami. Oleh karena itu, pembuatannya tidak boleh serampangan melainkan harus mempertimbangkan desain dan warna, posisi gambar dan kata-kata, dan keringkas. Sementara Phillipps (2012:4) dari Leipzig University of Hannover berpendapat

bahwa atribut ini adalah bagian media visual yang dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis dalam ilmu sosial terutama untuk merekonstruksi perbedaan orientasi dan disposisi di antara para demonstran. Di dalam tulisan yang sama pula, ia mengemukakan bahwa sekalipun spanduk protes didominasi oleh tulisan itu tetap bisa sebagai media visual karena “sumber teks disusun dan direpresentasikan dengan cara tertentu sehingga representasi dan penerimaan teks dipengaruhi oleh komposisinya, ukuran huruf, jarak antar baris, jenis huruf, dan lain-lain” (Phillipps 2012:8).

Sebuah pameran virtual bertajuk *Vote for Women: A Visual History* yang diselenggarakan oleh Brandywine River Museum of Art Amerika Serikat di tahun pandemi ini menambah pemaknaan penggunaan spanduk sebagai sumber analisis sejarah. Amanda Burdan, sang kurator, dalam tiga belas potongan video pendek menuturkan bahwa spanduk-spanduk protes perempuan menuntut hak pilih perempuan tahun 1913 itu dapat dibaca sebagai revolusi kesadaran perempuan dan peran mereka dalam sejarah Amerika Serikat (lihat Gambar 1). Selain itu, Burdan juga memberikan penekanan bahwa spanduk tersebut merupakan arsip visual yang mampu memperkaya data dan memperlihatkan realitas serta kehadiran aktor-aktor yang tidak terlihat dalam sumber tekstual terbitan pemerintah (Brandywine River Museum of Art 2020).

Dalam konteks inilah, penulis terinspirasi untuk memperkaya historiografi Indonesia dengan menggunakan sumber alternatif berupa spanduk protes perempuan. Berikutnya, penulis juga berpendapat bahwa penulisan sejarah perempuan Indonesia melalui sumber spanduk protes yang belum lazim dilakukan di Indonesia ini kiranya dapat menjadi studi awal bagaimana sejarah perempuan di Indonesia yang masih minim kajian itu (Dobbin 1996:44-51; Kuntowijoyo 2003:113, Purwanto 2006:29-31; Taylor 1996:13-16) dapat ditulis dari sumber-sumber-sumber yang remeh-temeh bahkan menjadi bagian sampah keseharian manusia di tahun 2020. Hal ini menjadi penting terutama ketika kita membaca kegelisahan dan harapan sejarawan perempuan Indonesia tentang bagaimana menulis sejarah kebangsaan

secara komprehensif dan cara meninggalkan perasaan skeptis atas ketersediaan sumber sejarah perempuan (Amini 2018:65).

Dari uraian-uraian di atas pula, penulis mencatat bahwa kajian tentang spanduk dalam penulisan sejarah perempuan bisa dimulai dari menganalisis tampilan visual protes perempuan. Misalnya saja, gambar, ilustrasi, dan poster dari museum, perkumpulan bersejarah, koleksi pribadi serta foto-foto bersejarah pawai dan aksi unjuk rasa, termasuk prosesi hak pilih yang memvisualisasikan pesan politik kompleks yang disampaikan oleh para perempuan pemrotes.

Penggunaan sumber ini sebenarnya bukan hal baru dalam historiografi perempuan. Taylor (1996:14) misalnya telah menulis bahwa “rekaman foto-foto resmi memberikan kilasan tingkat partisipasi perempuan”. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa foto menawarkan ide-ide untuk menulis sejarah sosial untuk mengimbangi sejarah politik yang sudah ada (Taylor 2013:372).

Gagasan sama juga dikemukakan oleh Lucas. Ia mengemukakan bahwa “pembacaan terhadap gambar-gambar fotografi dengan cara yang berbeda dapat membantu memperluas pemahaman kita tentang pengalaman perempuan, dengan cara-cara yang tidak dapat dilakukan oleh catatan sejarah lainnya (arsip, surat kabar kontemporer, bahkan catatan sejarah lisan).” Di samping itu, foto-foto memungkinkan kita meninjau kembali peristiwa sejarah, terutama menangkap kehidupan sehari-hari wanita, serta melihat perspektif yang tidak hanya didominasi oleh kisah kegiatan laki-laki (Lucas 1996:47-49).

Penelitian ini tidak difokuskan pada foto-foto perempuan pembawa spanduk. Idenya berasal dari Phillipps (2012:8) bahwa sebagian besar penelitian visual umumnya terfokus pada makna gambar yang dimaksudkan yaitu simbol dan tanda-tanda mereka dan bagaimana ini dirasakan oleh pencipta dan audiens mereka. Padahal, di dalam foto seringkali ada teks yang keberadaannya tidak bisa diabaikan. Misalnya saja teks-teks dalam foto perempuan yang sedang melakukan protes dan membawa, merentang, atau mengangkat spanduk menuntut hak pilih di Amerika Serikat maupun di Inggris pada 1908 telah menciptakan sebuah kacamata yang tidak terlupakan untuk menceritakan

kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hunte dan Matters (2018) menulis bahwa spanduk merupakan “potret kuat dari sejarah, prestasi, dan aspirasi perempuan.” Mengutip Mary Lowndes, penulis Banner&Banner-Making (1909), mereka menulis bahwa “sebuah spanduk yang melayang di angin, berkelap-kelip ditiup angin, menggoda kesenangan, setengah menunjukkan dan setengahnya lagi menyembunyikan perangkat yang ingin Anda jelaskan...Pilih ungu dan emas untuk ambisi, merah untuk keberanian, merah untuk keberanian, hijau untuk harapan lama” (Hunte dan Matters 2018).

Persoalannya kemudian adalah, semua foto yang diproduksi pada tahun-tahun revolusi adalah hitam putih bahkan sudah mulai rusak. Bagaimana menangkap fenomena di tengah ketidakjelasan sumber yang sangat terbatas tersebut?

Argumen Lucas (1996) menjadi pemecah kebuntuan. Ia menulis bahwa satu elemen penting di dalam foto hitam putih perempuan pada masa revolusi adalah kostum mereka, termasuk gaya rambut yang menjadi penanda percampuran tradisi dan modern. Pendapat itu menjadi semakin kuat apabila kita membandingkannya dengan tulisan Taylor (1996:13) yang menganalisis perbedaan busana antara laki-laki dan perempuan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Busana, tulis Taylor, menempatkan perempuan di masa lalu Indonesia, sebagai simbol tradisi, sementara laki-laki, dalam varian setelahnya, tampak mengklaim diri mereka sebagai “plasenta di dunia modern, untuk berorientasi pada masa depan.” Dalam bahasa Locher-Scholten (2000:122) “busana dapat memperlihatkan ekspresi penggolongan sosial seperti, umur, kelas, dan gender; menunjukkan nilai dan norma sosial...sebagai penanda sosial dari kelompok atau individu...penunjuk identitas.” Pendeknya, busana adalah “refleksi konstruksi sosial suatu masyarakat” (Locher-Scholten 2000:122). Dalam konteks ini, kostum, pakaian, selempang, dan lambang aktivisme perempuan bisa digunakan sebagai bahan perbandingan antara representasi dan realitas perjuangan perempuan untuk memenangkan tuntutannya.

Sekalipun terinspirasi dari spanduk protes perempuan untuk memperjuangkan hak

pilihnya, tulisan ini akan fokus pada kajian periode yang relatif paling kosong dari penulisan sejarah Indonesia, yaitu revolusi (Dobbin 1996:44-51; Taylor 1996:13-16). Taylor (1996) menyebut bahwa penulisan sejarah perempuan pada masa ini perlu terus dikaji dan ditinjau ulang karena historiografi revolusi Indonesia kekurangan dokumen (arsip tertulis terbitan pemerintah) dan analisis terkait dengan peran perempuan di ranah publik selama periode tersebut. Selain itu, historiografi Indonesia juga tidak menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa besar mempengaruhi perempuan, baik dalam perang, diplomasi, maupun angkatan kerja. Tidak kurang, historiografi perempuan Indonesia masa tersebut hanya juga berfokus pada peranan mereka dalam dapur umum, kelaskaran, palang merah, juga kongres perempuan tanpa pernah menyinggung sedikitpun tentang sisi-sisi emosional apalagi kewarganegaraan perempuan dalam negara yang baru. Padahal, “mereka adalah sosok-sosok yang juga menggerakkan, mewarnai dan menghidupi zaman itu” (Sasi 2016:177).

Lebih lanjut, tulisan ini akan fokus menganalisis aspek kebangsaan dan kewarganegaraan perempuan yang relatif tidak pernah tersentuh dalam historiografi (Amini, 2016). Bahkan, sebuah karya bernas tentang pembentukan Indonesia dan pergulatan keindonesiaan seperti yang ditulis Engelson (2008) dalam *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan* luput dan sama sekali tidak menyinggung aktivitas maupun eksistensi perempuan dalam proses ini. Padahal, kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sensitif, dan berimplikasi besar terhadap perempuan (Blackburn 2004:85; Taylor 1996:27). Di lain sisi, pembahasan tentang aktivitas kewarganegaraan perempuan sebatas pada keberhasilan perempuan Indonesia dalam mendapatkan hak pilih aktif untuk pertama kalinya pada tahun 1941 (Blackburn 2004:84; Hestirani 2020; Locher-Scholten 2000:151).

Berangkat dari uraian-uraian di atas tulisan ini mencoba untuk menganalisis aktivitas kewarganegaraan perempuan pada masa revolusi Indonesia melalui spanduk yang dibawa mereka ketika melakukan protes. Adapun pertanyaan penelitiannya ialah: (1)

apakah perempuan yang melakukan protes tersebut adalah aktivis feminis? (2) apakah mereka memprotes kesetaraan? (3) apakah protes itu adalah kehendak mereka sendiri atau digerakkan oleh laki-laki.

METODE

Sumber utama tulisan ini adalah arsip visual berupa album dan buku kenangan, maupun surat kabar dan majalah sezaman yang memuat foto-foto aksi protes atau demonstrasi perempuan yang mengangkat atau merentangkan spanduk di Yogyakarta sebagai ibu kota negara dan jantung Republikan. Penelusuran sumber dilakukan di Jogja Library Center serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2018-2020 serta Perpustakaan Universitas Leiden dan Arsip Nasional Belanda di Den Haag pada akhir tahun 2019.

Dari kegiatan ini, penulis “hanya” menemukan empat peristiwa protes di Yogyakarta yang memuat foto perempuan pembawa, pengangkat, atau perentang spanduk maupun perempuan yang berada di sekitar spanduk protes. Keempat peristiwa yang dimaksud adalah aksi penolakan penangkapan Ratulangie pada 1946, penolakan Negara Pasundan dan Pawai Hari Ibu 1947, serta Kongres Wanita 1949.

Di tengah kelangkaan sumber tentang spanduk protes perempuan, saya mengikuti tahapan interpretasi Phillips (2012). *Pertama*, mendeskripsikan semua elemen visual dan tekstual. *Kedua*, merekonstruksi makna elemen visual dan tekstual yang membentuk integrasi. *Ketiga*, mengidentifikasi orientasi atau ekspresi budaya tertentu, dan mencari keterkaitannya.

PEMBAHASAN

Manifestasi Kewarganegaraan Baru

Protes perempuan bukan hal baru di Yogyakarta. Di masa kerajaan, mereka sudah mengenal budaya *pepe*. Sementara itu, seiring dengan pembentukan birokrasi kolonial, protes dilakukan dengan cara yang berbeda melalui lembaga peradilan yang telah dibagi-bagi berdasarkan ras dan kelas sosial. Tulisan Margana (2008) tentang berita

acara pemeriksaan di Kadipaten Pakualaman bisa menjadi contohnya. Namun demikian, tradisi protes dengan menganggot spanduk adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan dalam historiografi Indonesia dan sulit merunutnya. Boleh jadi, kebiasaan ini mulai tumbuh seiring dengan propaganda dan mobilisasi di masa Jepang.

Di masa revolusi, ada beberapa peristiwa atau gerakan yang melibatkan mobilisasi massa perempuan. Peristiwa pertama gelora sentimen anti-Jepang dan usaha-usaha pengambilalihan kekuasaan di kalangan perempuan-perempuan yang mendapatkan pelatihan (semi)militer pada periode sebelumnya (penjajahan Jepang). Salah satunya adalah keterlibatan Siti Aisyah (Ngaisah) dan Oemiyah dalam aksi pawai dan pendudukan Tyookan Kantai (sekarang Gedung Agung) 21 September 1945. Kedua gadis pegawai Jawatan Pos Telepon Telegram dan berafiliasi dengan Pemuda Pathuk itu memanjat dan menurunkan bendera persegi putih dengan lingkaran merah di tengah itu.

Adapun peristiwa kedua adalah peringatan ulang bulan kedua Republik Indonesia untuk pertama kalinya di Yogyakarta 17 Oktober 1945 di Alun-alun Lor Yogyakarta. Selain pidato politik dari tokoh-tokoh nasional terkemuka seperti Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, Moh. Saleh (Ketua Komite Nasional Indonesia), Soedarsono (Kepala Kepolisian), juga Moeridan (Wakil Badan Keamanan Rakyat), acara yang dimeriahkan oleh spanduk “Basmilah mata2 nica,” “Laskar Rakjat bertempoer,” serta “moesoeh hantjoer” juga diisi dengan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, pengulangan Pekik Merdeka, serta pidato-pidato dari para ibu yang kehilangan anaknya di front (Sasi 2015). Namun, peristiwa-peristiwa tersebut tidak menggambarkan dengan jelas posisi perempuan secara independen dan “hanya” menempatkan perempuan sebagai penyokong laki-laki.

Hal sama juga terjadi dengan gerakan pawai keliling kota yang diselenggarakan oleh setiap kampung di Yogyakarta sebagai bagian dari berjaga-jaga serta peringatan Hari Ibu 22 Desember 1945. Sekali lagi, tidak ada sumber visual yang bisa menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut juga siapa saja dan seperti

apa perempuan yang terlibat dalam berbagai peristiwa tersebut.

Salah satu potret yang memuat dengan jelas aktivitas dan gerakan protes adalah peristiwa penolakan penangkapan Ratulangi 4 April 1946. Ada hal yang mencolok dalam foto tersebut, yaitu penampakan perempuan di bawah spanduk bertulis “KAMI TIDAK MENGHENDAKI PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN DENGAN PENANGKAPAN DR. RATULANGI! GUBERNUR PEMIMPIN DLL SULAWESI” serta peta Indonesia dengan tulisan “ITULAH REPUBLIK INDONESIA” dan bendera Merah Putih.

Ratulangie adalah orang yang sangat anti-Barat terutama Belanda. Ia aktif dalam pergerakan di Minahasa. Ketika masa Pergerakan ia mendirikan mingguan *Nationale Commenteren* lalu harian *Pewarta Selebes* pada masa Jepang. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menulis ajakan untuk bersiaga dan bersiap-bersiap berjuang untuk mempertaruhkan hidup dan mati bagi Indonesia Merdeka (NEFIS No. 04084; Procereur General bij het Hoogerechtshof Ned-Indie 1945-1950 No. 475).



Gambar 2. Menolak penangkapan Ratulangie
Sumber: Badan Kontak Wanita KRIS (1977)

Perempuan-perempuan yang berada di dalam gambar itu adalah perempuan-perempuan Sulawesi, khususnya beretnis Minahasa, yang tergabung dalam organisasi Kebhaktian Rakjat Indonesia Sulawesi (KRIS). Di Yogyakarta organisasi ini dipimpin oleh Kindangen dan

“lebih banyak memfokuskan kegiatannya pada bidang sosial, terutama menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi dari Kawana dan menyokong persediaan pangan” (Hardi 1982:79). Di lain sisi, mereka adalah kelompok yang marginal di Yogyakarta (Badan Kontak Wanita Kris, 1977:6).

Selain hal-hal di atas salah satu hal menarik lainnya adalah pakaian mereka. Semua perempuan yang ada di dalam foto tersebut memakai *jurk* atau gaun. Penampilan tersebut relatif istimewa dan tidak biasa di Yogyakarta. Keistimewaan itu akan lebih kuat apabila dibandingkan dengan foto lain yang menampilkan kemencolokan perempuan-perempuan Minahasa yang ada di Yogyakarta. Dalam kata lain, mereka identik dengan modernitas. Lucas (1996:47) menulis bahwa pakaian semacam ini merupakan pertanda, bahwa mereka terhubung dengan dunia karier dan kebebasan personal.



Gambar 3. Perempuan KRIS
Sumber: IPPHOS-Foto Antara

Kesan ini semakin kuat apabila foto protes tersebut disandingkan dengan foto tentang gambaran tiga gadis muda Sulawesi yang berpakaian sangat kontras satu sama lain, terlebih dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Dalam konteks inilah, penulis berasumsi bahwa busana revolusi perempuan merupakan manifestasi imajinasi mereka tentang keindonesiaan. Di lain sisi, sejarawan pun dapat menulis ideologi, etnisitas, kelas, rasisme, juga modernitas, konstruksi gender, dan feminitas masa revolusi dari pakaian yang mereka kenakan.

Serum (Pergerakan) Perempuan

Sementara itu, tahun 1947 menjadi waktu yang berat bagi Republik Indonesia. Selain

wilayahnya menyempit akibat perjanjian Linggarjati dan kemunculan negara-negara bagian, negara ini juga menghadapi blokade ekonomi Belanda seiring dengan serangan militer pada 27 Juli. Tekanan seperti itu memunculkan fenomena korupsi yang sebenarnya telah terkikis pada empat bulan pertama kemerdekaannya. Boerdah Joesoepadi Danoehadiningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Nyonya B. Joesoepadi, ketua Kowani menulis kritik yang cukup tajam tentang hal itu dalam *Kedaulatan Rakjat* 20 Desember 1947. Menurutnya, segala celaka yang terjadi di masyarakat itu karena “wanita Indonesia telah menghilangkan kewanitaannya.”

Sang ibu lupa akan beberapa dasar keibuan, terdorong oleh susahnja penghidupan, sang suami dibiarkan mendjalankan corruptie, apa lagi kalau activiteit membantunja, berarti tak kuat mempertahankan dasar2 keibuan lagi, sehingga tak dapat mempengaruhi sang suami tjelakalah rumah tangga dan tjelakalah masjarakat dan tjelakalah negara kita “in making” ini....Wanita akan membesarkan corruptie, djika wanita lupa pada djiwanja...Zaman kedatangan pengungsi banjak di antara mereka jang terdjerat sewa rumah jang tinggi....Djika wanita jang punja rumah memakai dasar djiwa ibu tentu tidak akan terjadi semacam itu.

Buruknya kondisi masyarakat di tahun itu menggerakkan Kowani untuk menyelenggarakan rapat samudra atau rapat akbar. Masih mengutip Nyonya B. Joesoepadi, acara itu penting dan mendesak dilakukan sebagai serum untuk perempuan dan pergerakan perempuan. Adapun elemen-elemen perempuan yang tergabung dalam acara tersebut ada enam, yaitu: Kowani dengan segenap organisasi perempuan yang tergabung didalamnya, WAPP, PPRI, Pelajar Wanita, Buruh Wanita, serta penduduk wanita di setiap kementren atau kecamatan yang ada di Yogyakarta dan perempuan-perempuan yang tidak memiliki organisasi. Kecuali Buruh Wanita yang berkumpul terlebih dahulu di kantor SOBSI Jalan Tugu nomor 2, mereka berkumpul di Alun-alun Utara Yogyakarta pada 07.00 atau setengah jam sebelum acara dimulai.

Kowani dalam siarannya pada 20 Desember 1947 di *Kedaulatan Rakjat* mewajibkan setiap elemen yang hadir membawa spanduk yang merepresentasikan kegelisahan terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi perempuan baik sebagai warga negara, anggota masyarakat, serta anggota keluarga dengan peranan sosial masing-masing (Anonima 1947).



Gambar 4. Hari Ibu 1947
Sumber: Lucas (1996)

Lucas (1996:48) memberikan sebuah persepsi yang menarik terkait dengan representasi perempuan pada peringatan Hari Ibu di Alun-alun Utara Yogyakarta itu. Menurutnya, pakaian mereka merupakan percampuran antara gaya berpakaian Barat dan tradisional, dengan gaya rambut berbeda. Selain itu pesannya juga beraneka ragam, mulai dari IBU SENDJATA BUDI NEGARA, DJUGA WANITA SANGGUP MEMIKUL SENDJATA!; BASMI KEMEWAHAN HILANG KEMISKINAN; BANDJIRI PALANG MERAH, KURANG TUMPAH

DARAH; RIS ALAT PEMECAH KESATUAN REPUBLIK SENDJATA PERSATUAN, BERSATU TETAPI!; PABRIK MAKANAN UNTUK RAKJAT DAN...; WANITA INDONESIA BERHAK MENUNTUT D.K. SOAL INDO BELANDA LEKAS DISELESAIKAN DESAK; DIDIKLAH KAMI PEMANGKU NEGARI; KITA MENGETIK UNTUK PERDJUANGAN, TENUN: PINTAL BENANG! KITA TIDAK TELANJANG! MUSUH KITA TERDJANG; AJO RAME2 KE SAWAH; serta SELAMATKANLAH SELURUH NEGERI. Sementara spanduk-spanduk lainnya yang berada di dalam foto tidak bisa terlihat dengan jelas.



Gambar 5. Hari Ibu 1947
Sumber: IPPHOS-Foto Antara

Menilik dari elemen perempuan yang hadir dalam rapat samodra tersebut serta spanduk-spanduk yang bisa terbaca kiranya bisa teridentifikasi siapa pemiliknya juga isu yang diangkat maupun kondisi yang sedang dihadapi Republik Indonesia. Misalnya saja spanduk bertuliskan ibu sendjata budi negara yang disertai dengan ilustrasi perempuan Jawa adalah milik Kowani, sekalipun tidak jelas organisasi perempuan yang membuatnya juga. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Boerdiah Joesoepadi, spanduk ini adalah pengingat moral di zaman revolusi khususnya untuk memerangi praktik korupsi yang merajalela. Begitu juga dengan spanduk tuntutan kepada D.K atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) dan harapan tentang keselamatan negeri adalah milik federasi perempuan untuk merespon agresi dan blokade ekonomi Belanda serta kemunculan negara-negara Serikat.

Kemerosotan ekonomi akibat serangan 27 Juli 1947 juga menjadi isu utama yang diangkat

oleh organisasi Buruh Wanita. Mereka menyoroti tentang ketelanjangan, sulitnya mencari tekstil, juga kekurangan makanan. Tentang dua hal pertama itu, memoar perempuan elite yang disusun oleh Lasmidjah Hardi et al dalam lima jilid buku bahkan menggambarkan dengan jelas bahwa mereka menjual kain atau pakaian yang ada untuk ditukar dengan makanan yang juga sama sulitnya untuk didapat.

Sementara kalimat spanduk DJUGA WANITA SANGGUP MEMIKUL SENDJATA ATAU BANDJIRI PALANG MERAH KURANGI TUMPAH DARAH KIRANYA adalah milik WAPP atau Wanita Pembantu Perjuangan. yang bermarkas di Jalan Bintaran Tengah No. 3 gadis setidaknya harus berumur delapan belas tahun ke atas untuk bisa masuk kelaskaran perempuan dan berangkat ke front. Selain itu, mereka juga harus lulus pendidikan sekolah menengah, mendapat izin orangtua atau wali, surat keterangan dokter, serta surat keterangan dari pamong praja atau polisi (Sasi 2017:180).

Perspektif berbeda tentang peringatan Hari Ibu 1947 dapat Kita tangkap dari foto IPPHOS. Dalam foto tersebut, fokus fotografer bukan pada spanduk atau perempuan pembawa spanduk melainkan pada wartawan perempuan yang sedang mengabadikan tersebut. Hal ini kiranya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji konstruksi keperempuanan pada waktu itu, yaitu tentang sosok perempuan pendobrak kelaziman zaman yang memakai rok, kemeja, dan memiliki profesi yang tidak biasa sebagai wartawan yang sedang mengabadikan peristiwa. Kesan ini ditambah dengan keterangan "Wartawati beraksi dalam peringatan hari Ibu, 22 Desember 1922." Dengan kata lain, pakaian dan profesi adalah dua hal yang menjadi sorotan utama dalam foto berlatar belakang perempuan membawa spanduk itu. Dalam hal ini pernyataan Sasi (2016) tentang revolusi sebagai sebuah kesempatan dan dunia baru bagi perempuan kiranya perlu dipertimbangkan bagi sejarawan yang memiliki fokus pada periode tersebut.

Menjahit Kesetiaan (?)

Setelah berstatus sebagai ibu kota per 4 Januari 1946, Yogyakarta seperti kual

lebur (*melting pot*) bagi manusia Indonesia yang telah bertransformasi sebagai warga negara Republik Indonesia. Mereka yang membayangkan kesatuan Republik dan menyebut dirinya sebagai Republikan secara bertahap meninggalkan tempat asalnya dan menuju kepada kota impian dan harapan, yaitu ibu kota kaum Republik atau *Kiblik*. Perpindahan manusia secara besar-besaran dan dalam dalam waktu singkat itu memicu gesekan terbuka maupun tertulis sebagaimana dapat dilihat dalam surat pembaca. Salah satunya sebagaimana dimuat dalam *Kedaulatan Rakjat* 2 Maret 1946.

Pagi ini pikiran Semar rada2 kopjor karena banyaknya telepon dan reaksi tentang kebanyakan pengungsi dalam Podjok KR kemarin. Nyonya Moertini Soediro seorang pengungsi dari Bogor, menyerahkan surat protesnya...Boeng Semar, membaca tulisan Tuan Sastrodiredjo saya sebagai pengungsi menjawab sebagai berikut. Orang pengungsi itu tentu sebagian orang baik-baik. Kalau Agen NICA tentu tidak perlu susah payah mengungsi di Yogyakarta karena di Jakarta bisa hidup senang dengan konco-konconya. Pengungsi banyak uang? Uang itu bukan dari NICA melainkan dari pendapatan penjualan barang isi rumah tangga dari tempat mereka yang ditinggalkan, jika masih untung belum digedor Gurkha Nica. Pakaianya bagus-bagus? Memang kita punya pakaian biar bagus atau jelek dipakai sehari-hari. Pakaian tidak untuk disimpan di lemari sampai rusak dimakan ngengat. Itu rak aturan orang yang melebihi batas alias kapitalis. Menumpuk-numpuk pakaian sebanyak-banyaknya namun sayang tidak dipakai. Makan serba enak? Memang kita berpendapatan. Kesehatan badan itulah benda yang paling besar. Dengan kesehatan badan itu pula, kita bisa memikir jernih, hati yang teguh asal jangan melebihi batas; lupa sama si miskin. Main bayar saja? Ketahuilah orang-orang pengungsi itu tidak punya bujang. Untuk menghemat waktu kita belanja secepat-cepatnya tidak bisa menawar sak ndil sak sen. Hal kupon beras? Itu tidak hanya karena banyaknya pengungsi saja, tetapi

sebab susahnya pengangkutan bukan? Kita tahu bahwa bahan makanan di waktu genting ini tidak mudah seperti biasa.

Realitas ini kiranya relevan dengan tulisan Reid (2018:228) bahwa revolusi menciptakan mitos baru tentang pengorbanan juga “komunitas yang dibayangkan,” yang baru, untuk menggantikan identitas masa lalu yang didiskreditkan”. Di lain sisi, periode ini juga memunculkan sebuah fenomena peningkatan perseteruan dan kecurigaan lokal, misalnya apa yang terjadi antara (orang) Surakarta terhadap Yogyakarta; Jawa terhadap Sunda; Melayu terhadap Batak; Toba terhadap Karo; Aceh terhadap Batak; serta semua orang terhadap Ambon dan Tionghoa (Reid 2018:215).

Kehidupan sebagai Republikan di ibu kota Republik yang berstatus sebagai pengungsi, tamu, orang asing, dan kelompok lain (*the other*) dengan beragam stigma namun tetap bertahan pada kepercayaan (baca: imajinasi) mereka sebagai warga negara Republik yang bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan dan kesatuannya ini tampak dalam aksi protes perempuan berspanduk adalah demonstrasi penolakan Negara Pasundan 11 Mei 1947. Di Alun-alun Utara, sekelompok perempuan (salah satunya Mariah Ulfah), bermandi matahari, bergabung dengan laki-laki, tampak kepayahan menahan panas, namun takzim mengikuti ketika menyatakan sumpah kesetiaan kepada Republik Indonesia dan Sukarno serta penuh gelora ketika menjawab pekik merdeka dari Sukarno.

PETROEK DJADI RADJA, karikatur van Mook yang sedang menunggangi Kartalegawa dalam rupa anjing, MENGHENDAKI PERSATUAN INDONESIA 100%, serta spanduk bergambar bendera Merah Putih dengan tulisan yang hanya terlihat BUNG KARNANO dan REPUBLIK INDONESIA adalah sekilas spanduk yang terlihat dalam peristiwa tersebut. Penulis mencoba menggunakan kaca pembesar untuk bisa mengidentifikasi tulisan-tulisan yang termuat dalam spanduk-spanduk yang memenuhi foto tersebut namun nihil. Di sinilah kiranya tampak bahwa sang fotografer tidak menjadikan spanduk-spanduk sebagai fokus bidikannya, melainkan “lautan manusia” yang sedang berdemonstrasi menyuarakan.

Sekalipun hanya empat spanduk yang teridentifikasi, itupun rumpang, itu relatif cukup untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. *Petruk jadi raja* atau *Petruk jadi ratu*, misalnya, adalah sebuah lakon Goro-goro (sisipan dalam pewayangan yang mengangkat suara rakyat). Ia adalah salah satu punakawan (selain Semar, Gareng, dan Bagong) yang digambarkan tinggi kurus berhidung sangat panjang dan mulut terbelah hingga telinga (Lombard 2008:134-135). Ia diamanati Priyambada yang memenangi perang dengan Dewi Mustakaweni agar menjaga jimat yang diperebutkan dalam peperangan di tempat yang aman. Alih-alih menyimpannya, ia justru menjalin persengkongkolan dengan dengan Bhatara Guru dan Bhatara Narada mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Prabu Belgeduwelbeh Tongtongsot dan menamai kerajaan barunya dengan nama Sonyawibawa.



Gambar 6. Menolak Negara Pasundan I
Sumber: *Kedaulatan Rakjat*

Dalam konteks ini, lakon Petruk menjadi metafora bagi Suria Kartalegawa yang memproklamasikan Negara Pasundan dan mengangkat dirinya sebagai presiden. Suria Kartalegawa—kadang-kadang ditulis Surja Kartalegawa—adalah mantan bupati Garut 1927-1944. Mula-mula ia mendirikan Partai Rakjat Pasundan karena kecewa tidak mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di lain sisi, ia marah karena orang-orang yang diangkat sebagai pejabat di Jawa Barat bukanlah orang

Sunda melainkan orang Jawa. Sepak terjang Kartalegawa dalam partai yang mengaku sebagai representasi orang-orang Sunda yang terjajah oleh orang-orang Jawa ini digambarkan secara lengkap dalam skripsi Sunarya (1991). Mengutip Sunarya, gerakan Partai Rakjat Pasundan sudah dimulai sejak April 1946. Kartalegawa mengawali kegiatannya dengan menemui tokoh-tokoh di Bandung yang tidak menyukai Republik. Gerakan terang-terangan baru dimulai ketika Inggris menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Puncaknya, 20 November 1946 ia mengumumkan secara resmi keberadaan partainya.

Keberadaan Partai Rakjat Pasundan semakin menguat dengan jalinan komunikasi yang dilakukan oleh Kartalegawa dengan Belanda. Frakking (2016) dalam analisisnya tentang Negara Pasundan menyoroti bahwa Belanda (van Mook) sebenarnya tidak ingin mendukung Kartalegawa karena ia terkenal sebagai sosok yang korup. Namun demikian, pilihan itu tidak bisa ditolak karena mereka membutuhkan sosok yang bisa menjadi alat untuk menggerogoti kekuasaan Republik Indonesia.

Proklamasi Negara Pasundan dilaksanakan di Alun-alun Bandung pada 4 Mei 1947. Mengutip Sjamsuddin et al (1992:30) dan Sunarya (1991:47) ada sekitar 5.000 yang hadir dalam acara tersebut, kebanyakan berasal dari Ujungberung dan Kiaracandong yang diangkut dengan truk truk militer Belanda. Adapun poin-poin proklamasinya ada tujuh. *Pertama*, Partai Rakyat Pasundan dengan ini memproklamkan kemerdekaannya negara Pasundan sesuai dengan kemauan rakyat Sunda dalam hubungannya federatif karena jalan ini adalah satu-satunya untuk politik negara ini di kemudian hari. *Kedua*, Partai Rakyat Pasundan akan menentang usaha-usaha untuk memasukkan daerah-daerah yang telah dimerdekakan ke dalam Republik. *Ketiga*, Partai Rakyat Pasundan mendorong supaya di daerah-daerah yang telah dimerdekakan maupun di daerah Republik diadakan pemungutan suara. *Keempat*, Partai Rakyat Pasundan menjadikan Bandung sebagai ibukota negara “Negara Pasundan.” *Kelima*, Partai Rakyat Pasundan akan mengurus pengembalian pabrik-pabrik dan onderneming kepunyaan bangsa asing kepada

yang punya. *Keenam*, Partai Rakyat Pasundan akan meminta pengakuan pemerintah sementara di daerah-daerah yang dimerdekakannya jika pemungutan suara berhasil. *Ketujuh*, Partai Rakyat Pasundan minta untuk pemerintahan sementara ini status sama dengan pemerintahan Indonesia Timur. *Terakhir*, Partai Rakyat Pasundan memilih anggota pemerintahan sementara dari Negara Pasundan R.A.A.M.M. Suria Kartalegawa sebagai presiden dan Mr. Kustomo sebagai pembentuk kabinet dan anggota-anggota lainnya dalam kabinet tersebut tidak akan diumumkan untuk menjaga keselamatan masing-masing.

Proklamasi Kartalegawa itu membuat gaduh Republik(an). Berbagai demonstrasi digelar bahkan sebelum hari pelaksanaan proklamasi. Hal itu terjadi karena rencana proklamasi itu sudah diumumkan oleh Mr. Kustomo, sekretaris Partai Rakjat Pasundan sekaligus perdana menteri Negara Pasundan pada 29 April 1947. Di Yogyakarta, orang-orang Jawa Barat yang menjadi pejabat pemerintahan maupun rakyat pengungsi biasa—pengungsi Jawa Barat menempati jumlah terbesar, setelah itu Sulawesi, Jawa Timur, Maluku, lalu Sunda Kecil—bereaksi dengan menghidupkan kembali Paguyuban Pasundan untuk menandingi Kartalegawa.

Di lain sisi, proklamasi Negara Pasundan oleh Kartalegawa juga menjadi tajuk berita Kedaulatan Rakjat selama dua minggu Mei 1947. Tidak hanya mengutuk tindakan itu, artikel-artikel yang mayoritas menempati halaman pertama itu juga mengungkapkan siapa sebenarnya Kartalegawa. Aroedji Kartawinata, misalnya, menyebut Kartalegawa sebagai adalah sosok yang dikenal tidak baik sejak masa Hindia Belanda. Pimpinan Partai Serikat Islam Indonesia sekaligus Divisi Siliwangi itu tampaknya membuat pilihan kata-kata yang halus untuk tidak menyebutnya sebagai pejabat korup atau koruptor. Selanjutnya, Kartalegawa juga dianggap sebagai “barang mati, mati imannya sebagai orang Islam, dan mati pula iman dan jiwanya sebagai orang Indonesia” juga “orang gila” (*Kedaulatan Rakjat* 5 Mei 1947).

Kegilaan Kartalegawa itu diperkuat dengan tanggapan-tanggapan dari anak juga ibunya. Juliana Kartalegawa anak Kartalegawa

yang telah bersalin nama menjadi Goeniwa Karta Legawa, memberikan keterangan bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu hanyalah bagian “sandiwara proklamasi”. Selain itu ia juga menyatakan keherannya mengapa ayahnya memihak Belanda. Keheranannya itu menjadi tajuk berita *Kedaulatan Rakjat* dengan judul yang sangat mencolok *Goeniwa Heran: Mengapa ayah saja masoek NICA?* dan bersanding dengan komentar-komentar pemuka Jawa Barat yang ada di Yogyakarta seperti Otto Soebrata, Moch. Enoch, Ir. Djoeanda, serta Aroedji Kartawinata. Sementara itu, komentar-komentar penyesalan ibu Kartalegawa juga menjadi sisipan berita bahkan tajuk utama berita dalam waktu yang berbeda-beda. Ketiga Sukarno melakukan kunjungan ke Garut 19 Mei 1947 untuk meredam gejolak yang ada di Jawa Barat, kedua perempuan tersebut menemui presiden dan menyatakan kekecewaannya terhadap tingkah laku Kartalegawa yang memiliki nama kecil Oetja itu. Foto mereka menjadi tajuk berita *Kedaulatan Rakjat* 25 Mei 1947 dengan keterangan gambar yang sarat dengan pesan yang cukup menohok tentang penyesalan seorang ibu melihat anak yang dilahirkannya berkhianat terhadap negara yang sangat dicintainya.

Sementara itu, protes terhadap Kartalegawa juga dikirimkan oleh sosok terkemuka di Jawa Barat sekaligus ketua Dewan Pertimbangan Agung, R.A.A. Wiranatakoesoema. Mengutip Antara, *Kedaulatan Rakjat* 5 Mei 1947 menuliskan jika Negara Pasundan menurut Wiranatakoesoema tidak memiliki dasar sejarah seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Ditinjau dari segi politik dan ekonomi, itu mustahil akan dapat berdiri.”

Kesan tentang buruknya Kartalegawa juga menjadi framing *Kedaulatan Rakjat*. Wonohito—menggunakan nama inisial W.H.—redaktur utama surat kabar itu memulai pemberitaan dengan paragraf pembuka yang menggelitik, “Sebenarnya malas tangan menggerakkan pena akan menoliskan sesoetoe tentang ‘gerakan Soeriakartalegawa.’ Kartalegawa hanjalah soetoe figuur jang amat ketjilnja jang tidak ada artinja sama sekali.”

Selain sebutan-sebutan di atas,

Kartalegawa juga menjadi olok-olokan di Yogyakarta. Hal itu karena ia memproklamasikan kepasundanan dan gerakan kebangkitan orang Sunda yang terpinggirkan oleh orang Jawa namun mengangkat orang Jawa (Mr. Koestomo) sebagai pimpinan pentingnya. Selain bukan Sunda, keburukan Mr. koestomo itu juga diungkapkan sebagai orang yang banyak menanggung kekecewaan. Di masa penjajahan Jepang, misalnya, ia justru dengan sukarela masuk kamp dan menganggap dirinya sebagai orang Belanda.

Segala framing dan fakta-fakta diri Kartalegawa maupun orang-orang di sekelilingnya yang dikupas habis agaknya membentuk opini publik dan melahirkan kosakata “Petruk dadi ratu”. Dengan demikian, spanduk itu bukanlah semata-mata menjadi metafora bagi Kartalegawa. Itu sekaligus menjadi ironi bahwa Kartalegawa hanyalah seorang abdi biasa yang tidak mempunyai apa-apa. Ia mengangkat diri menjadi membentuk Negara Pasundan dan mengangkat diri menjadi presiden dengan persekongkolan jahat Kaseman dan van Mook, kayaknya Bhatara Guru dan Bhatara Narada. Di lain sisi, spanduk bergambar Kartalegawa dalam rupa anjing sedang dinaiki van Mook semakin memperkuat ironi tersebut. Anjing NICA adalah nama batalyon Infanteri KNIL. Akan tetapi, nama ini menjadi depersonifikasi untuk orang-orang yang patuh atau menjadi pelayan penurut bagi tuannya.

Pada awalnya, orang-orang yang di Yogyakarta menganggap apa yang dilakukan oleh Kartalegawa adalah sebuah lelucon dari orang yang tidak mendapat “kue revolusi” atau hiburan punakawan Petruk. Hal ini terlihat dari istilah yang digunakan yaitu “Gerakan Kartalegawa.” Namun, itu mendapat tanggapan serius dari tokoh-tokoh terkemuka yang namanya dicatut Kartalegawa untuk melegitimasi “gerakannya.” Selain itu, tanggapan serius juga disebabkan kemunculan sosok bernama Abdoel Moefachir Moehammad Heroeningrat yang mengaku sebagai raja Banten yang mendukung proklamasi Negara Pasundan dan mengirim telegram kepada Wihelmina dan van Mook supaya diangkat sebagai raja (*Kedaulatan Rakjat* 7 Mei 1947). Kebenaran tentang sosok ini disiarkan tanggal

10 Mei 1947, yaitu bahwa ia hanyalah mantan *klerk* (juru tulis) dari Rembang yang sejak 1941 meminta supaya dimasukkan dalam silsilah keluarga Pangeran Ahmad dan mendapat gelar Raden Mas atau Tubagus. Selain itu, proklamasi Negara Pasundan juga memunculkan negara-negara lainnya seperti Bangka, Belitung, Riau, serta Kalimantan. Mereka menganggap lelucon Kartalegawa itu kontrarevolusi sehingga harus dibasmi.

Sebuah ulasan menarik dimuat *Kedaulatan Rakjat* 8 Mei 1947, hari yang sama dengan kegiatan pengumpulan orang di Jawa Barat mempersiapkan demonstrasi menentang Kartalegawa dan Negara Pasundan. Ulasan itu berisi penjelasan bahwa Kartalegawa itu seperti Belgedoewelbel dalam cerita petruk dadi ratu. Ia tidak layak dilawan oleh Gatotkaca dan hanya Gareng yang bisa melucuti mahkota dan pakaiannya lalu mengembalikannya ke wujud aslinya. Gatotkaca, mengutip surat kabar tersebut adalah metafora untuk Sukarno sementara Gareng saudaranya adalah Paguyuban Pasundan yang telah dihidupkan kembali.

Dengan demikian, demonstrasi 11 Mei 1947 menolak Kartalegawa merupakan pertunjukkan untuk membongkar kedok sang raja Belgeduwelbeh. *Bel* atau seringkali diucapkan *mbel* adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan, sementara *geduwelbeh* adalah ungkapan yang mengikutinya untuk menyatakan omong kosong dari si dobleh (banyak bicara) yang semua isi pembicaraannya tidak bisa dipercaya. Upaya pembongkaran kedok itu diperkuat dengan sumpah kesetiaan yang menjadi keterangan foto sumpah kesetiaan yang dibuat oleh *Kedaulatan Rakjat* 17 Mei 1947, "Segenap poetra Indonesia daerah Pasoendan berdiri boelat dibelakang Pemerintah Repoeblik Indonesia serta menentang dan tidak mengakoei proklamasi Kartalegawa." Pada akhirnya, demonstrasi penolakan-penolakan terhadap Kartalegawa yang marak dilakukan, terutama di Yogyakarta, berhasil menciptakan framing tentang Kartalegawa dan membuat van Mook melakukan kebijakan ulang tentang Negara Pasundan setelah Agresi Militer I.

Di manakah posisi perempuan? Analisis terhadap spanduk-spanduk dalam peristiwa ini menghasilkan temuan bahwa perempuan

tidak menjadi fokus utama dalam aksi protes tersebut. Media khususnya *Kedaulatan Rakjat* menggeneralisasikannya sebagai bagian rakyat dari daerah Pasundan di Yogyakarta yang bersumpah setia kepada Republik Indonesia. Meskipun demikian, foto-foto berspanduk tersebut kiranya dapat dibaca juga bahwa perempuan dari Jawa Barat mengidentifikasi dirinya bagian dari organisasi kewilayahan yang tidak terbatas dari etnisitas. Artinya, Paguyuban Pasundan yang mereka ikuti tidak hanya mengakomodasi perempuan-perempuan beretnis Sunda melainkan lebih luas lagi yaitu wilayah Jawa Barat dengan beragam etnis yang menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Hal ini kiranya selaras dengan tulisan Henley (1993:112) bahwa intelektual Sunda yang tergabung dalam Paguyuban Pasundan, sejak masa pergerakan, merupakan sosok-sosok yang sangat dekat dengan kelompok nasionalis unitaris. Oleh karena itu kiranya dapat dipahami bahwa dalam pertunjukkan itu perempuan pun lebur dalam gerakan nasionalis.

Masih mengenai perempuan dari Jawa Barat, Lasykar Wanita Repoeblik Indonesia merupakan unsur penting yang tidak disuarakan dalam pertunjukkan tersebut. Identifikasi sosok-sosok perempuan di dalam foto anggota kelaskaran yang dipimpin oleh Yati tersebut juga tidak mudah. Namun demikian, ada hal yang harus dicatat bahwa kelaskaran tersebut merupakan salah satu penarik utama gadis-gadis muda untuk ambil bagian dalam revolusi. Lasywi juga menjadi alternatif bagi mereka yang tidak tahan melihat banyaknya fraksi dalam organisasi perempuan elite nasional (Kongres Wanita Indonesia).



Gambar 7. Menolak Negara Pasundan II
Sumber: *Merdeka* 1 Mei 1948

Generalisasi perempuan Jawa Barat dalam demonstrasi kembali muncul ketika Hubertus Johannes van Mook mengambil alih Negara Pasundan dan mengangkat sosok yang populer yaitu R.A.A. Wiranatakoesoema sebagai presidennya. Di Yogyakarta, demonstrasi dilakukan dengan bersepeda dan mengusung spanduk berbunyi “Bukan Wiranatakusumah jg penting djadi Republikein tapi DJAWA BARAT HARUS TETAP DAERAH REPUBLIK!!!” Spanduk tersebut menarik tidak saja penggunaan hurufnya yang mencampurkan huruf tegak bersambung melainkan juga kapital. Kapitalisasi huruf itu menunjukkan alasan utama mengapa demonstrasi tersebut digelar. Di lain sisi, itu juga menggambarkan imajinasi tentang kesatuan.

Berbeda dengan demonstrasi tahun sebelumnya, ketika menolak Kartalegawa, demonstrasi Kandjeng Hadji, nama populer untuk Wiranatakoesoema, berjalan sepi. Sementara spanduk yang dibuat pun tidak terlalu ekstrem dengan menggunakan metafora maupun simbol-simbol depersonifikasi. Di samping ia sosok yang populer dan disegani, mereka masih menyimpan harapan terhadap sosok yang mempunyai pengalaman sebagai Republikan dan masih mempercayai jika Hubertus Johannes van Mook kembali salah menunjuk orang, kali ini wali negara yang mencintai dan dicintai rakyatnya (*Merdeka* 1 Mei 1948).

Asa Indonesia

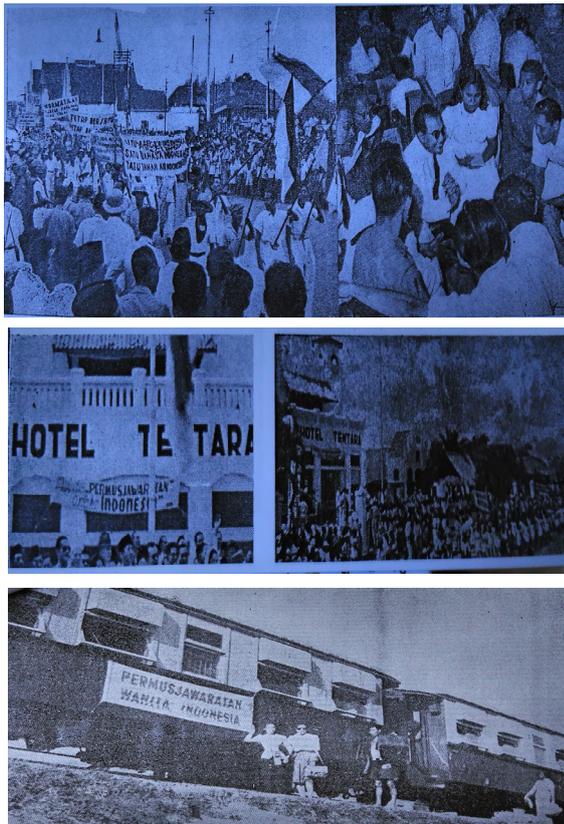
Pada akhirnya, proses menjadi Indonesia perempuan Yogyakarta pada masa Revolusi di antaranya terlihat dari Kongres Inter Indonesia yang disusul dengan Kongres Wanita Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta 28-29 Agustus 1949. Selama dua hari itu, perempuan-perempuan dari Negara Republik Indonesia Serikat berkumpul di Hotel Tentara (Hotel Tugu) untuk menyamakan persepsi tentang Indonesia yang mereka bayangkan, sebelum menghadapi Konferensi Meja Bundar. Ada delapan puluh dua organisasi perempuan diundang dalam acara tersebut. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya berasal dari Republik Indonesia melainkan juga Republik Indonesia Serikat (Sasi, 2016:189).

Banyak yang datang dari luar Jawa. Tempat musyawarah diadakan di Hotel Tugu, tempat tidur yang tersedia tidak mencukupi, sehingga harus ditambah dengan kasur-kasur yang digelar di bawah. Kekurangan sprej diatasi dengan meminjam kain dari para ibu yang datang dari Jakarta, yang dijual untuk menutupi biaya musyawarah. O! Betapa rukunnya ibu-ibu pada waktu itu. Segala kekurangan penyelenggaraan tertutup dengan semangat persatuan dan kesatuan mensukseskan KMB (Hardi 1982:186).

Stuers (2008:179) menulis bahwa konferensi ini sangat berhasil karena kongres ini diselenggarakan di negara yang telah terbagi menjadi dua dan sudah hancur, bahkan serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Foto pertama pada Gambar 7 barangkali tidak terlalu jelas menggambarkan suasana kecuali tulisan Permusjawaratan Wanita Indonesia dan dua perempuan yang dengan bangga dan berseri “memamerkannya” dalam bidikan lensa sang fotografer. Namun, foto ini akan menarik apabila disandingkan dengan pengalaman Stuers ketika mewawancarai Hafni Abu Hanifah. Mengutip pimpinan teras Kowani tersebut, kongres di Yogyakarta menghilangkan sekat antara anggota delegasi. “Pimpinan menjadi satu di antara 360 perempuan delegasi yang berasal dari Jakarta. Jumlah ini semakin bertambah dengan keberadaan delegasi dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang bergabung di kereta yang sama (jumlahnya tidak diketahui).” Kepada Stuers, Hanifah juga menceritakan jika transportasi menuju ke jantung Republik Indonesia di Yogyakarta yang kerap mereka sebut sebagai wilayah pedalaman itu tersebut bukanlah kereta biasa. *Pertama*, kereta itu dihiasi dengan plakat dan bendera merah putih. *Kedua*, kereta itu dikawal oleh tentara Belanda dan pemuda Republik secara bergantian.

Di bawah pengawalan Belanda, kereta harus melewati daerah bebas yang berbahaya yang dikuasai para pejuang yang menentang segala bentuk perundingan dengan Belanda. Di dekat Tegal, ratusan Pemuda yang membawa

Bendera Merah Putih berbondong-bondong masuk ke kereta. Mereka disambut dengan antusias oleh para perempuan yang kebanyakan dari mereka bahkan baru melihat para pejuang ini untuk pertama kali. Para pejuang mengira anak-anak muda Indonesia ditahan di kereta ini tetapi ketika mereka mengetahui bahwa penumpang kereta adalah para delegasi perempuan, mereka mengizinkan kereta itu lewat tanpa gangguan (Stuers 2008:195).



Gambar 8. Kongres Inter Indonesia dan Permusjawaratan Wanita Indonesia

Sumber: Lukisan Revolusi

Jika foto perempuan yang berseri-seri di depan gerbong kereta delegasi yang telah dihiasi dengan spanduk bertuliskan Permusyawaratan Wanita Indonesia dan penuturan yang dirangkum oleh Stuers disatukan maka akan menjadi sesuatu yang menarik. *Pertama*, tentang kebahagiaan perempuan yang membayangkan sebagai perempuan Indonesia yang akhirnya menginjakkan kakinya di jantung ibu kota negara sekaligus kota pengungsian bagi kaum Republikan. *Kedua*, foto itu bisa menangkap hal yang tidak bisa dilukiskan dalam teks yaitu tentang perempuan yang meninggalkan

keluarganya untuk bermusyawarah dan konsolidasi tentang Indonesia di masa depan yang mereka cita-citakan. *Ketiga*, kata wanita Indonesia tidak hanya manifestasi dari imajinasi terbayang mereka tentang negara yang baru terbentuk dan harapan-harapan mereka melainkan juga memuat identitas baru bahwa sebagai perempuan-perempuan yang hidup di pusat Republik yang telah menjadi wilayah pendudukan tidak mengurangi rasa nasionalisme mereka juga menjadi Indonesia. *Terakhir*, spanduk itu akan menjadi menarik apabila dibandingkan dengan foto kedua Gambar 8 yang memperlihatkan Hotel Tentara bertuliskan permusyawaratan Indonesia atau dalam historiografi Indonesia dikenal sebagai Konferensi Inter Indonesia.

Penambahan kata wanita dalam hal ini menunjukkan eksistensi perempuan bahwa perempuan juga terlibat dalam proses kenegaraan sebagai warga negara yang baru. Mereka bersatu untuk memenangkan kemerdekaannya dan tidak ikut laki-laki memenangkan kemerdekaannya dan mengusir kolonialisme. Dalam konteks ini mereka tidak lagi memperdulikan tentang perbedaan ideologi di antara mereka baik sebagai republikan tahu federalis progresif atau federalis konservatif atau bagian dari pemerintah Interim atau Recomba. Bagi mereka keruntuhan kolonialisme dan kemenangan dari perwakilan Republik Indonesia di Den Haag adalah hal yang paling mendesak untuk dicapai persoalan selanjutnya bisa diputuskan apabila sudah pergi.

Para perempuan ini, mengutip Stuers, juga melakukan hal yang luar biasa mereka menjahit segala keberagaman menjadi bentuk kesetiaan kepada pemimpin yang akan berhenti juga bagian Republik yang tidak terpisahkan juga menyebutkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak memiliki nama ini memiliki visi ke depan dan merumuskan tuntutan dasar. Ada tiga tuntutan mereka. Di bidang hukum mereka mencanangkan bahwa Konstitusi Republik yang akan menang nantinya akan harus menegaskan secara positif kesetaraan hukum bagi laki-laki dan perempuan bagi seluruh penduduk dan hak setiap penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu undang-undang perburuhan harus melindungi para pekerja umum dan perempuan secara khusus.

Hal ini bisa dipahami karena perempuan hanya menerima 80% gaji untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki dan diselesaikan dalam waktu yang sama dengan jumlah yang tidak berbeda. Selain itu, peraturan yang digagas di bidang hukum adalah hukum perkawinan yang harus dibuat sesuai dengan tuntutan agama. Adapun tuntutan mereka lainnya adalah kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan dengan bantuan kantor konsultasi poliklinik dan insitusi bagi perempuan usia lanjut yang diabaikan oleh keluarganya. Terakhir, mereka menuntut adanya pembentukan koperasi.

Sementara itu di bidang pendidikan mereka menuntut pemberantasan buta huruf latin dan beasiswa bagi anak perempuan. Hal ini menarik bagaimana mereka konsolidasi dan bernegosiasi bahwa lebih dari kemenangan tentang negara. Kemenangan delegasi yang di Den Haag akan membawa harapan bagi mereka untuk mewujudkan kesetaraan di lain sisi ini tidak sama dengan yang disebut oleh banyak sejarawan bahwa perempuan pada masa revolusi semata-mata hanya dimobilisasi untuk mendukung kemenangan perang dalam konteks tuntutan-tuntutan perempuan itu terlihat jelas bahwa perempuan juga memiliki agenda sendiri yang berbeda dari laki-laki tentang imajinasi dan orientasi juga tentang Indonesia dan keindonesiaan. Kemandirian perempuan itu kiranya melebihi dari tujuan mereka sebagai gerakan mempertahankan kemerdekaan perempuan-perempuan ini sedang berusaha untuk mewujudkan Negara impian mereka walaupun tidak menunggu lama hanya berselang tiga tahun kemudian mereka harus menemui kekecewaan karena poligami Sukarno, Bapak Bangsa yang sangat mereka junjung.

PENUTUP

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Yogyakarta di masa revolusi adalah Yogyakarta di masa revolusi adalah kualifikasi lebur bagi beragam etnis terutama yang menasbihkan dirinya sebagai Republikan. Namun, sama seperti yang dikemukakan oleh Reid (2018) kualifikasi itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Tulisan Sasi (2016) menjadi contoh bagaimana etnis, asal wilayah, juga

relasi dengan kolonial, baik Belanda maupun Jepang, menjadi beberapa dasar peminggiran dan penyingkiran seseorang atau kelompok.

Sekalipun demikian, foto-foto protes perempuan berspanduk dalam empat peristiwa di ibu kota Republik Indonesia kiranya mampu menghadirkan realitas yang belum tersentuh oleh sumber tekstual khususnya dokumen-dokumen resmi tentang revolusi. Di lain sisi, fenomena itu juga menawarkan sebuah diskusi, yaitu tentang proses menjadi Indonesia dan transformasi kewarganegaraan dari sudut pandang perempuan. Di tengah kekompleksan dan kedinamisan revolusi, tampak bahwa perempuan pada periode ini juga bukan suatu subjek atau objek kajian yang tunggal. Mereka terdiri dari kelompok yang heterogen dan memiliki agenda masing-masing sekaligus independen (tidak ikut gerakan laki-laki) terkait dengan manifestasi imajinasi mereka. Hal ini kiranya juga selaras dengan tulisan Sasi (2010) tentang keberagaman gerakan perempuan Indonesia masa revolusi.

Kekompleksan dan kedinamisan masa revolusi juga membawa pada kesimpulan bahwa gerakan protes perempuan dalam keempat peristiwa tersebut bukan semata-mata digerakkan oleh perempuan-perempuan elite aktivis feminis. Hal itu terlihat dari realitas bahwa perempuan-perempuan penggerak atau yang turut bergerak dalam aksi-aksi justru berasal dari dua wilayah dan etnis yang dipinggirkan di Yogyakarta, yaitu wilayah Sulawesi dan Jawa Barat, jantung utama Belanda, dan etnis Minahasa dan Sunda yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda.

Sementara sosok perempuan lainnya adalah perempuan yang datang dari wilayah pendidikan atau Recomba, atau Interim yang justru aktif berkonsolidasi dan bernegosiasi bagaimana sebagai warga negara Indonesia dan memenangkan Republik Indonesia dalam pertikaiannya dengan Belanda. Fenomena ini menarik apabila kita menempatkannya dalam kerangka hubungan antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan Negara Federal. Historiografi Indonesia begitu juga buku dan teks pelajaran di sekolah memproduksi narasi bahwa negara Federal atau Serikat atau Federal adalah negara boneka Belanda. Padahal, ada banyak kekompleksan yang terjadi

seperti federalis konservatif (pro-Belanda), progresif (pro-Indonesia) juga independen (tidak memihak Belanda dan Indonesia serta memiliki imajinasi sendiri tentang Indonesia). Dalam konteks inilah tulisan ini kiranya bisa menjadi dasar bagi penulisan sejarah kompromi perempuan-perempuan federalis dengan berbagai latar belakangnya dengan perempuan Republikan terutama yang berasal dari wilayah Kiblik Yogyakarta demi masa depan Indonesia yang mereka bayangkan.

Akhirnya, protes perempuan berspanduk kiranya merepresentasikan ragam ideologi perempuan dan gerakan feminis pada masa revolusi. Sementara isu-isu yang diangkat pun beraneka ragam dan menggambarkan ekspresi serta negosiasi perempuan sebagai warga negara baru, kesetaraan terutama di bidang ekonomi, sekaligus gerakan moral untuk menjaga marwah revolusi sebagaimana yang mereka bayangkan. Dengan demikian, keempat peristiwa protes perempuan itu adalah panggung imajinasi keindonesiaan, sementara aktivitas merentangkan atau mengangkat spanduk adalah bagian meregang konsensus keindonesiaan seperti yang mereka bayangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Mutiah. 2018. "Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan." *Jurnal Perempuan* Volume 13 Tahun 2018.
- Anonima. 1947. "Rapat Samodra Wanita Memperingati Hari Ibu." *Kedaulatan Rakjat* 20 Desember 1947.
- Badan Kontak Wanita KRIS. 1977. *Indonesia Merdeka: Sekedar Sumbangsih Kami*. Jakarta: Badan Kontak Wanita KRIS.
- Bekar, Mira. 2015. "Space, Language and Power: The Rhetoric of Street Protests." *Социолошки преглед*, vol. XLIX (2015), no. 3, стр. 337–348 (<https://pdfs.semanticscholar.org/ece3/celc9a7edf95dc4861c184a8646692ecd6f.pdf>).
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Victoria: Monash University.
- Brandywine River Museum of Art. 2020. *Vote for Women: A Visual History*. Diakses 17 Juni 2020 (<https://www.brandywine.org/museum/exhibitions/votes-women-visual-history>).
- Engelson, R.E. 2008. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Frakking, Roel. "Gathered on the Point of a Bayonet': the Negara Pasundan and the Colonial Defence of Indonesia, 1946–50" *The International History Review* Volume 39, 2017 - Issue 1: Allies at the end of empire: loyalists, nationalists and the Cold War, 1945-76 (<https://doi.org/10.1080/07075332.2016.1214611>).
- Hardi, L. 1981. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Buku I*. PT Dunia Pustaka.
- . 1982. *Sumbangsihku Bagi Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran) Buku II*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Wanita Pejoang.
- Hardi, L et al. 1983. *Sumbangsihku Bagi Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran) Buku III*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Wanita Pejoang.
- .1984. *Sumbangsihku Bagi Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran) Buku IV*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Wanita Pejoang.
- .1985. *Sumbangsihku Bagi Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran) Buku V*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Wanita Pejoang.
- Hestirani, Laskmita. 2020. "Pemikiran Maria Ullfah Santoso tentang Hak Pilih Perempuan Indonesia (1938-1941). *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.
- Hidayat, Reja dan Dieqy Hasbi Widhana. 2019. *Atribut Kampanye Pemilu 2019 Bikin Sampah Visual di Ruang Publik*. Diakses 19 Juni 2020 (<https://tirto.id/atribut-kampanye-pemilu-2019-bikin-sampah-visual-di-ruang-publik-dhBS>).

- Hunter, Clare dan Sewing Matters. 2018. "Our History of Banner-Making." Diakses 19 Juni 2020 (<https://www.processions.co.uk/story/history-banner-making>).
- IPPHOS-Foto Antara. 2015. *70th RI: Histori Masa Depan*.
- Jusupadi, B. 1947. "Harapan Kepada Hari Ibu dan Koperensi di Madras." *Kedaulatan Rakjat* 20 Desember 1947.
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Diakses 17 Juni 2020 (https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2033%20THN%202018.pdf).
- Locher-Scholten, E. 2000. *Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. (<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-317091>).
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: 3 Warisan Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lucas, Anton E. 1996b. "Image of Women During the Indonesian Revolution," dalam Jane Drakard dan John Legge (ed), "Indonesian Independence Fifty Years on 1945-1950," *Annual Indonesia Lecture Series* No. 20. Meulbourne: Monash Asia Institute.
- Margana, Sri. 2008. *Konteks Historis Sosiologis Sengketa Hukum di Kadipaten Pakualaman pada Masa Kolonial: Naskah Sumber Arsip Seri 4*. Yogyakarta: Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY.
- NEFIS No. 04084.
- Phillipps, Axel. 2012. "Visual Protest Material as Empirical Data." *Visual Communication* 2012 11:3 (<https://doi.org/10.1177/1470357211424675>).
- Procereur General bij het Hoogerechtshof Ned-Indie 1945-1950 No. 475.
- Pusat Bahasa. 2019. *Spanduk*. Diakses 17 Juni 2020 (<https://kbbi.web.id/spanduk>).
- Reid, Anthony. 2018. *Indonesia, Revolusi, & Sejumlah Isu Penting*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Samsjuddin, Helius et al. 1992. *Menuju negara kesatuan: Negara Pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Sasi, Galuh Ambar. 2010. "Gerakan Perempuan Indonesia dalam Konstelasi Politik 1950-an: Studi Perwari." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- .2015. "Gelora Api (Ke)Merdeka(an) Indonesia di Jawa Tengah" dalam Restu Gunawan et al, *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sasi, Galuh Ambar. 2016. "Menjadi Indonesia: Pergulatan Identitas, Jejaring, dan Relasi Perempuan di Yogyakarta pada Masa Revolusi" dalam Sri Margana et al (ed). *Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan Pandangan Berkebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sasi, Galuh Ambar. 2017. *Di Tanah Kiblik: Perempuan Yogyakarta dalam Ge(mer)lap Revolusi dalam Sri Margana et al, Gelora di Tanah Raja : Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945-1949*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Stuers, Cora Vreede de. 2008. *Sejarah Perempuan di Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sunarya, Yohanes Edi. 1991. "Sekitar negara Pasundan 1947." *Skripsi*, Sanata Dharma University.
- Taylor, Jean Gelman. 1996. "Images of the Indonesian Revolutions," dalam Jane Drakard dan John Legge (ed), "Indonesian Independence Fifty Years on 1945-1950," *Annual Indonesia*

Lecture Series No. 20. Meulbourne:
Monash Asia Institute.

.2013. "Aceh: Narasi Foto, 1873-1930," dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (ed), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, dan Pustaka Larasan.

Wouters, Ruud dan Stefaan Walgave. 2017. "Demonstrating Power: How Protest Persuades Political Representatives." *American Sociological Review* 2017, Vol. 82(2) 361–383 (<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122417690325>).